

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) berhubungan erat dengan perspektif global untuk membangun sekolah-sekolah berkinerja tinggi. Perspektif ini menekankan perlunya transformasi sekolah nasional menuju SBI dengan karakteristik otonomi yang lebih luas, kapasitas inovatif, kinerja berkualitas, dan orientasi nilai. Strategi untuk mewujudkan SBI perlu terlebih dahulu mengungkapkan kondisi keefektifan sekolah sebagai dukungan terhadap, pengembangan SBI dengan karakteristik tersebut. Analisis terhadap SBI di negara maju dan dalam negeri menghasilkan sejumlah tertentu faktor keefektifan maupun karakteristik SBI.

Sekolah-sekolah bertaraf internasional yang muncul sejak tahun 1990an ternyata kemudian meluas sekolah negeri dan swasta nasional di berbagai kota besar. Melihat perkembangan ini, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (dalam Tim Direktorat Tenaga Kependidikan, 2006) telah membuat kebijakan mengenai standar komponen-komponen input, proses, dan output. Juga, mengenai pembagian tugas diknas pusat, propinsi, dan kabupaten/kota dan sekolah yang menyangkut kebijakan dan standar, perencanaan dan pembiayaan, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, dan pengendalian mutu. Untuk memudahkan upaya sekolah-sekolah yang ada mengalihkan diri menjadi SBI, suatu strategi kiranya diperlukan agar transformasi ini bukan sekedar peningkatan kualitas, melainkan

sekolah dengan karakteristik-karakteristik tertentu yang tidak dimiliki sebelumnya.

Upaya tersebut dapat dimulai dengan mendeskripsikan sekolah internasional yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan telah mapan memiliki berbagai karakteristik tertentu dari SBI. Deskripsi ini kemudian dikembangkan menjadi karakteristik utama yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pengembangan SBI oleh pemerintah kabupaten/kota.

Direktorat Tenaga Kependidikan telah mengidentifikasi sejumlah karakteristik SBI negara-negara maju. Karakteristik ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk memetakan sekolah-sekolah berbasis internasional yang terdapat di Indonesia. Kesenjangan yang mungkin muncul dari hasil pemetaan tersebut merupakan informasi penting untuk merumuskan strategi pengembangan SBI, yang antara lain, menyangkut kesiapan suatu sekolah.

Strategi tersebut merupakan upaya untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 Ayat 3, yang mengharuskan pemerintah dan/atau pemerintah daerah (pemda) menyelenggarakan pada semua jenjang sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Visi yang mendasari ketentuan ini adalah bahwa sistem pendidikan perlu tampil sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa. Kondisi seperti ini kiranya diperlukan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia sebagai manusia berkualitas yang mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Penyelenggaraan pendidikan yang bertaraf internasional dilatarbelakangi oleh era globalisasi menuntut kemampuan daya saing yang kuat dalam teknologi, manajemen dan sumber daya manusia, upaya peningkatan mutu, efisien, relevan, dan memiliki daya saing kuat. Upaya peningkatan mutu, efisiensi, relevansi, dan peningkatan daya saing secara nasional dan sekaligus internasional ditetapkan pentingnya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional, baik untuk sekolah negeri maupun swasta.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bertaraf internasional, pendidikan bertaraf internasional yang bermutu (berkualitas) adalah pendidikan yang mampu mencapai standar mutu nasional dan internasional, pendidikan bertaraf internasional yang efisien adalah pendidikan yang menghasilkan standar mutu lulusan optimal (berstandar nasional dan internasional) dengan pembiayaan yang minimal.

Pendidikan bertaraf internasional harus relevan, yaitu penyelenggaraan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, orangtua, masyarakat, kondisi lingkungan, kondisi sekolah, dan kemampuan pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi). Pendidikan bertaraf internasional harus memiliki daya saing yang tinggi dalam hal hasil-hasil pendidikan (output dan outcomes), proses, dan input sekolah baik secara nasional maupun internasional. Berdasarkan uraian di atas disimpulkan perlu adanya pengembangan sekolah bertaraf internasional agar mencapai tujuan yang diharapkan.

Kemajuan globalisasi ditandai dengan persaingan sangat kuat diberbagai bidang memerlukan penguasaan teknologi, keunggulan manajemen dan sumber daya manusia (SDM). Terkait dengan tiga hal inilah, pemerintah Indonesia merasa perlu menyiapkan SDM unggul lewat pembenahan sistem pendidikan nasional (sisdiknas). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas merupakan dasar hukum penyelenggaraan sisdiknas (Depdiknas, 2007:1).

Pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tertuang upaya peningkatan mutu pendidikan, tepatnya pada pasal 50 ayat 3 yang berbunyi: *"Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional"*. Implementasi dari undang-undang tersebut, Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah akan melaksanakan proses layanan pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang diakui secara nasional dan internasional (Depdiknas, 2008:3). Salah satu realisasi dari layanan pendidikan yang berkualitas ini adalah dengan menyelenggarakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Menurut Slamet (2008), SBI adalah sekolah nasional yang menyelenggarakan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan mutu internasional SNP adalah standar nasional yang terdiri dari delapan komponen utama yaitu: standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional

pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (Tim Asa Mandiri, 2006:2-3).

Pemenuhan delapan SNP bagi SBI merupakan indikator kunci minimal. Indikator tambahan atau plus-nya adalah acuan standar pendidikan dari negara-negara anggota OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) atau negara-negara maju lainnya. Dalam proses pembelajaran, sesuai buku panduan SBI, pengajaran matematika dan IPA harus menggunakan bilingual: bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (Dharma, 2008). Selain itu, proses pembelajaran diperkaya juga dengan menerapkan pembelajaran berbasis TIK (teknologi informasi dan komunikasi) atau yang dikenal dengan *information communication technology* (Depdiknas, 2008:15).

Penyelenggaraan SBI dilakukan pada semua jenjang pendidikan, termasuk sekolah menengah atas (SMA). Haryana (2008) mengemukakan bahwa penyelenggaraan SBI pada jenjang SMA/MA telah dirintis sejak tahun 1990 an, yakni sebanyak 100 sekolah negeri dan dua sekolah swasta. Sementara itu, jumlah sekolah pada jenjang ini baik negeri maupun swasta lebih dari 22 ribu sekolah. Minimnya SMA bertaraf internasional yang telah ditetapkan sebagai rintisan lebih disebabkan pada minimnya pemenuhan persyaratan kriteria oleh sekolah yang ada.

Berdasarkan wawancara bebas yang dilakukan peneliti terhadap guru kimia yang mengajar di kelas RSBI SMA yang ada di Kota Medan, Binjai dan Deliserdang. pelaksanaan pembelajaran kimia di kelas RSBI belum memiliki pedoman yang jelas/kongkrit. Terkhusus dalam pembinaan RSBI, peran serta pemerintah daerah juga belum ada sehingga pada saat pelaksanaan, perbedaan yang terlihat antara pembelajaran Kimia di kelas reguler dan RSBI hanya terletak pada penerapan program bilingual dan ICT saja. Dengan kondisi seperti ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang terjadi sesungguhnya pada pembelajaran Kimia dengan menggunakan bilingual dan ICT serta untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Adapun objek penelitiannya adalah kelas X. Peneliti melakukan penelitian yang berjudul ” *Analisis kesulitan mengajar dan belajar Kimia di Kelas X Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMA Negeri di Kota Medan, Binjai dan Deliserdang* ”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka identifikasi masalah adalah untuk melihat sejauh mana pembelajaran kimia oleh Guru dan belajar kimia siswa dengan menggunakan bilingual dan ICT di Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional (RSBI) SMA Negeri di kota Medan, Binjai dan Deliserdang

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan Masalah dalam penelitian ini adalah pembelajaran Kimia oleh guru dan belajar Kimia siswa dengan menggunakan bilingual dan ICT di Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional(RSBI) , pada 3 Sekolah yaitu : SMA Negeri 1 Medan, SMA Negeri 1 Binjai, SMA Negeri 1 Lubuk Pakam.

1.4. Rumusan Masalah

Dari ulasan di atas, adapun yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah apakah terdapat kesulitan mengajar dan belajar kimia di kelas Rintisan Sekolah Bertaraf Internasioanal(RSBI) SMA Negeri di Kota Medan, Binjai dan Deliserdang.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah apakah terdapat kesulitan mengajar dan belajar kimia di kelas Rintisan Sekolah Bertaraf Internasioanal(RSBI) SMA Negeri di Kota Medan, Binjai dan Deliserdang.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh :

1. Bagi guru, sebagai bahan masukan untuk memperkecil atau bahkan meniadakan kelemahan-kelemahan yang ada pada pembelajaran kimia di kelas RSBI.
2. Bagi peneliti, dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran kimia di kelas RSBI.
3. Bagi Institusi pendidikan,
 - a. Perguruan Tinggi, terutama FKIP jurusan kimia sebagai salah satu gambaran pelaksanaan pembelajaran kimia di kelas RSBI, dan
 - b. Diknas, sebagai salah satu bahan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di RSBI SMA Negeri yang ada di Kota Medan, Kota Binjai dan Deliserdang.

